

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN**

#### **SECARA BERLANJUT TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)**



**Oleh :**

**SHEILA MASYITA M**

**B111 12 281**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
SECARA BERLANJUT TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm)

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh**

**SHEILA MASYITA M**

**B 111 12 281**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2016**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
SECARA BERLANJUT TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 61/PID. Sus/2015/PN. Sgm)

**Disusun dan diajukan oleh**


**SHEILA MASYITA M**

**B11112281**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu 3 Februari 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si**  
NIP. 19620711 198703 1 001

**Sekretaris**



**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002

**A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H**  
Nip.19610607 198601 1 003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

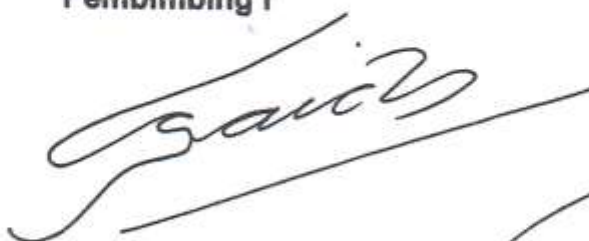
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **SHEILA MASYITA M**  
Nomor Pokok : **B111 12 281**  
Bagian : **HUKUM PIDANA**  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN SECARA BERLANJUT TERHADAP  
ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor  
61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)**

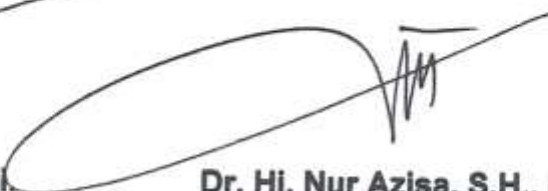
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2016

**Pembimbing I**



**Pembimbing II**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M. Si.**  
**NIP. 1962 0711 1987 031 001**

**Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
**NIP. 1967 1010 1992 032 002**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SHEILA MASYITA M.**  
No. Pokok : B111 12 281  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan  
Secara Berlanjut Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan  
Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**SHEILA MASYITA M, B111 12 281, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)***. Dibimbing oleh Bapak **H.M. Said Karim** selaku pembimbing I dan Ibu **Hj.Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm telah sesuai. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Syamsir Seni Bin Seni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak pada perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, kurang tepat. Pertimbangan yang digunakan hakim cenderung terfokus kepada pelaku tindak pidana saja. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)” sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Mudassir Muchsen, S.H. dan Ibunda Novita Farina Kasim, S.H. yang tak henti-hentinya mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, doa, dukungan baik moril maupun materil sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Juga kepada saudara dan saudariku yang tersayang, Fauziah Mufidah Muchsen dan Muh. Rafif Fadhlurrachman Muchsen yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis. Untuk itu, penulis haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku dosen-dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Seluruh Bapak-bapak/Ibu-ibu dosen, terkhusus dosen bagian Hukum Pidana dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa bersama seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
7. Keluarga besar Muchsen dan Kasim yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis.



8. Sahabat sekaligus saudariku, Almarhumah Rezky Febriyanti S, terima kasih atas segala kebaikan, kasih sayang, bantuan dan motivasi yang telah diberikan dari masa sekolah hingga akhir masa perkuliahan. Salam rindu selalu untukmu.
9. Ramadhan Satria Halim yang selalu memberikan perhatian dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan selama kuliah di Coetus, Azhima MJ Maricar, S.H., Irsalina Julia, Sadly Bakry, Putri Nirina, Rayhanah Firabi, Reski Paramita, Puput Dwi Maharti dan Yusrina Amalia. Terima kasih atas doa, dukungan, keceriaan dan kebersamaannya selama 3 tahun ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan selama kuliah di Papacu, Ichwanul Reiza, S.H., Hawa Salman, Aning Riani, Ekarini Septiana, A. Kartika Ramadhani, Ika Vebrianty, Adri Inggil, Maipa Deapati, Ramadhan Satria Halim, Muhammad Nur Fajrin, Muhammad Akmal Idrus, Syahrul Hidayatullah, Avel Haezer, Muhammad Syaifullah, Fairuz AS, Fauzan Zarkasi, Lutfhi Dhiaulwajdi, Fityatul Kahfi, Afif Muhni, Harry Prasetya, Musdalifah Supriady, Tri Putri Tami, dan A. Rizqy Ramadhani. Terima kasih atas doa, dukungan, keceriaan dan kebersamaannya selama 3 tahun ini.
12. Teman-teman berbagi suka duka dan keceriaan di Rikuantik dan Petekome.

13. Teman-teman seperjuangan Klinik Hukum 3 Anti Korupsi di Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan, terkhusus kepada tim 4 Public Campaign.
14. Teman-teman angkatan PETITUM 2012, penulis bangga menjadi salah satu dari kalian.
15. Teman-teman seperjuangan KKN Gelombang 90 UNHAS Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, terkhusus kepada penghuni Posko Induk Kelurahan Uluale, Raynald Christian Adhiwijaya, Andy Rezky Juliarno, Rudiantom Pritayanggi Angi, Raldy Palullungan, Andi Kartika Ramadhani, Puspita Wulandari Ali, Murtafiah Daris dan Almarhumah Rezky Febriyanti S atas persaudarannya selama ini.
16. Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR), Hml Komisariat Hukum UNHAS, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LEDHAK) dan International Law Student Association (ILSA) Chapter UNHAS.
17. Teman-teman seperjuangan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA) sektor Medan, sesama Delegasi UNHAS Pidu Imran dan Putri Nirina. Serta Delegasi UNPAD Feisal Rachman, Gustia Wulandari, Maryam Muthia, Elis Nuraeni, Nourma Al Viandari, dan Enkrina. Semoga kelak dapat berjumpa lagi.
18. Abang-abang dan Kakak-kakak di Universitas Sumatera Utara, Gabetta Solin, Albert Fernando, S.H., Fadhel Muhammad, S.H., Kiki

Ayu L Tambunan, S.H., Agnestesia Rizki, S.H., Festiri HD, S.H.,  
Vadea Oktari, S.H., Samuel Sitompul, Herman Tangkas dan Pramu  
Sitepu. Semoga kelak dapat berjumpa lagi.

19. Serta semua pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis tuliskan satu-persatu disini. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan serupa di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Januari 2016

Sheila Masyita M

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Tinjauan Yuridis .....	9
B. Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	15
C. Pidana dan Pemidanaan .....	23
1. Pengertian Pemidanaan .....	23

2. Teori-Teori Pemidanaan .....	24
3. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	26
D. <i>Concursus</i> dan Stelsel Pemidanaan .....	29
1. <i>Concursus Idealis</i> .....	30
2. Perbuatan Berlanjut .....	30
3. <i>Concursus Realis</i> .....	31
E. Anak.....	32
1. Pengertian Anak .....	32
2. Anak Sebagai Korban Pencabulan .....	35
F. Tindak Pidana Pencabulan .....	37
1. Pengertian Pencabulan.....	37
2. Unsur-Unsur Pencabulan.....	40
3. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Pencabulan Terhadap Anak .....	42
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	42
b. Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	43

G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	46
1. Pertimbangan Yuridis.....	46
2. Pertimbangan Sosiologis .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Lokasi Penelitian .....	50
B. Jenis dan Sumber Data .....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	51
D. Metode Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak dalam Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm .....	53
1. Posisi Kasus .....	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	56
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	65
4. Amar Putusan .....	66
5. Analisis Penulis .....	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak dalam Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm .....	73
1. Pertimbangan Hakim .....	73

2. Putusan Hakim .....	
.....	
79	
3. Analisis Penulis .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan



keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1</sup>

Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.<sup>2</sup>

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini

---

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Palopo, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.28 WITA

dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum;

2. Untuk mencegah rasa malu keluarga/pemuka adat/pemuka agama/tokoh masyarakat setempat;
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas;
4. Atas perintah atasan (yang tidak selalu berprespektif korban).<sup>3</sup>

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak** (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm)”.

---

<sup>3</sup> Pendapat polisi peserta diskusi akbar FHUI-STIK Kekerasan Seksual terhadap Perempuan tanggal 9 April 2013 di FHUI Depok, Dalam, Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, hlm. 386

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap putusan No.61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No.61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap putusan No.61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No.61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegakan hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya delik kesusilaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.



## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana pencabulan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari tindak pidana. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda disebut *delict*. Hukum pidana Belanda juga memakai istilah *strafbaar feit*.

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Nederland, maka para pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu.

*Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum

*Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

*Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>4</sup>

Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

**Vos** merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syarak* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *takzir*. Larangan-larangan *syarak* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>6</sup>

Beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para pakar hukum dari barat (Eropa) yakni:

**a. Van Hamel**

Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm.19.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, hlm.72.

<sup>6</sup> Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 48.

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-8, hlm. 61.

**b. Hazewinkel Suringa**

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>8</sup>

**c. Pompe**

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>9</sup>

**d. Simons**

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

Alasan dari Simons mengemukakan bahwa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-4, hlm. 182.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. Setiap *straafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onerchtmatige handeling*.<sup>11</sup>

Beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para pakar hukum dari Indonesia yakni:

**a. Andi Hamzah**

Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>12</sup>

**b. Moeljatno**

Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

**c. Wirjono Prodjodikoro**

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72., Dalam, Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Cetakan ke-3, hlm.50., Dalam, Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, hlm.58.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>15</sup>

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 64.

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat diedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :

- a). Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

**b). Menurut cara merumuskannya,** dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak

memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

**c) Berdasarkan bentuk kesalahan,** dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.



**d) Berdasarkan macam perbuatannya,** dapat dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat /atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

**e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,** maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

**f) Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.

**g) Dilihat dari sudut subjeknya**, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

**h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,** maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

**i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,** maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

**j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi,** maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan seterusnya.

**k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,** dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai

selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>16</sup>

## **C. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pemidanaan**

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi suatu yaitu memperbaiki pembuat.

Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

---

<sup>16</sup> Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, Dalam, Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.28.

## 2. Teori-Teori Pidana

Alasan pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>17</sup>

### a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain **Immanuel Kant** yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang

---

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141-145.

besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Tujuan**

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain **Paul Anselm van Feurbach** yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.<sup>19</sup>

#### **c. Teori Gabungan**

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat

---

<sup>18</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, Dalam, *Ibid*, hlm. 142.

<sup>19</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, 1985, Dalam, *Ibid*, hlm. 153.



memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

### **3. Jenis-Jenis Pemidanaan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana termasuk dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut.

#### **a. Pidana Pokok, meliputi:**

##### **1. Pidana Mati**

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana karena dicabutnya hak untuk hidup.

##### **2. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi, dari penjara

sementara minimal 1 hari sampai pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara maksimum ialah 15 tahun).

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih pendek daripada pidana penjara. Pidana kurungan terdiri dari dua macam yaitu pidana kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Kurungan prinsipal lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal: Gabungan kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan dalam Pasal 52 KUHP. Kurungan subsidair (pengganti denda) lamanya minimum 1 hari maksimum 6 bulan, dapat ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal: Gabungan kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam Pasal 52 KUHP.

### 4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda dapat

diganti dengan pidana kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar pidana denda.

**b. Pidana Tambahan**, meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.

Pencabutan beberapa hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan. Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu:

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan tertentu
- b. Hak untuk masuk Angkatan Bersenjata
- c. Hak dipilih aktif dan pasif anggota DPR, serta pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum
- d. Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain.
- e. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu adalah mencabut hak milik atau suatu barang dari seseorang dan barang itu dijadikan milik pemerintah. Barang-barang ini menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

- a. Barang-barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu. Sedangkan apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dirampas dalam hal-hal tertentu saja.

b. Barang-barang yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya senjata api yang dipakai untuk membunuh.

### 3. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarakan secara khusus akan disiarkan lagi sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

Pemidanaan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si pelaku tindak pidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.

## **D. *Concursus* dan *Stelsel* Pemidanaan**

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, *concursus* ini diatur dalam titel VI KUHP, adalah sebagai berikut:

1. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
3. *Concursus Realis* (Pasal 65-71 KUHP)

## **1. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)**

*Concursus Idealis*, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.<sup>20</sup>

## **2. Perbuatan Berlanjut (*voortegezette handeling*) (Pasal 64 KUHP)**

Perbuatan berlanjut (*voortegezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>21</sup>

Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:<sup>22</sup>

- a. Harus ada satu keputusan kehendak;
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.110.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.<sup>23</sup>

### **3. *Concursus Realis* (Pasal 65-71 KUHP)**

*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* ada beberapa macam, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.
- c. Apabila *concursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 112.

- d. Apabila *concursum realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 Ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Untuk *concursum realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

## **E. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Pengertian anak dalam peraturan di Indonesia bersifat pluralis, sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan tersebut. Pengertian-pengertian tersebut antara lain:

Menurut **Nicholas Mc Bala** dalam bukunya *Juveline Justice System* mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.<sup>25</sup>

Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.<sup>26</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain:

1) Undang-Undang tentang Sistem Pidana Peradilan anak

Pengertian Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

---

<sup>25</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.32-36.

<sup>26</sup> Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Refika Aditama, Bandung, hlm.19.



### Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

### Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

### Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

## 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

## 3) Undang-Undang tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

#### 4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

#### 5) Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

#### 6) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

## **2. Anak Sebagai Korban Pencabulan**

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :<sup>27</sup>

- a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang

---

<sup>27</sup> Adtya Emby, <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.htm>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 22.10 WITA.

belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.

- b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam Pasal 294 KUHP.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1). Melarang orang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengimingimingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2).

- b. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam Pasal 82.

## **F. Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Pencabulan**

Kata “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut :

“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).”

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina,

memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>29</sup>

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut **Hoge Road**, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>30</sup>

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :<sup>31</sup>

1. *Exhibitionism*: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling* : mengelus / meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

- a. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- b. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
- c. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
- d. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
- e. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- f. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- g. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu :<sup>33</sup>

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>33</sup> Adtya Emby, <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 22.10 WITA.

- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

## **2. Unsur-Unsur Pencabulan**

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.



### **3. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang**

#### **Pencabulan Terhadap Anak**

##### **a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP, landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun  
(2)Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3)Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 berbunyi :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 berbunyi :

(1)Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2)Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3)Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

Pasal 295 berbunyi :

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

**b. Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak**

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 :

(1)Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- enam puluh juta rupiah.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014.

Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sedangkan, bunyi Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual

terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.<sup>34</sup>

## **G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

#### **a. Dakwaan jaksa penuntut umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

#### **b. Keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

---

<sup>34</sup> Pengadilan Negeri Palopo, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.28 WITA

sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> E-Library, <http://elibrary.ub.ac.id/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-Putusan-Pidana-Bersyarat-studi-di-Pengadilan-Negeri-Karanganyar.pdf>, hlm. 35-38, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WITA.

Kemudian setelah mencantumkan hal-hal tersebut di atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop*.

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana.

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang beralamat di Jl. Usman Salengke No.103, Kabupaten Gowa. Penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literature, peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah, internet dan sumber bacaan lainnya, serta putusan perkara yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode: penelitian, yaitu

#### 1. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

### D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan

menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Posisi Kasus**

Kasus pencabulan yang penulis teliti ini terjadi pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI dengan korbannya adalah INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN, ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT, dan

AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bertempat di rumah terdakwa di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, saksi korban INDIRA yang sedang bermain dipanggil oleh terdakwa masuk ke dalam kamar. Selanjutnya saat saksi korban INDIRA berada di dalam kamar, terdakwa menaikkan saksi korban INDIRA ke atas tempat tidur dan membuka celana saksi korban INDIRA hingga batas lutut dalam keadaan berdiri, kemudian terdakwa juga membuka celana yang digunakannya sehingga saksi korban INDIRA melihat alat kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan jari telunjuknya ke alat kelamin saksi korban INDIRA dan saat itu juga terdakwa juga menggosok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air berwarna putih. Kejadian berikutnya, yang juga bertempat di rumah terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban AIRA untuk bermain bersama anak terdakwa, ALISA, di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya saat saksi korban AIRA telah berada di dalam kamar, terdakwa menaikkan saksi korban AIRA ke atas tempat tidur dan membuka celana korban hingga batas mata kaki dan dalam keadaan berdiri, kemudian terdakwa menggosok-gosokkan jari telunjuknya ke alat kelamin saksi korban AIRA. Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap saksi korban ANGGUN,

dengan cara membuka celana saksi korban ANGGUN kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban ANGGUN lalu memasukkan jari tangannya ke alat kelamin saksi korban ANGGUN sambil menggosok-gosokkannya. Pada saat itu saksi ALISA (anak terdakwa) ada di dalam kamar sedang bermain dan melihat terdakwa atau ayahnya mengolesi jari tangannya menggunakan minyak telon lalu terdakwa memegang-megang alat kelamin saksi korban INDIRA, saksi korban AIRA, dan saksi korban ANGGUN dengan menggunakan jari terdakwa dan sudah seringkali terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap para saksi korban.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor: VER/50/XII/2014 Rumkit Bhayangkara atas nama: INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN, Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT, dan Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Mauluddin M, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Tampak lecet geser pada selaput dara (*hymen*), tidak sampai dasar dan tidak berdarah.
- b. Tampak lecet geser pada serambi kemaluan bagian atas kanan.
- c. Korban tampak histeris dan ketakutan pada saat diperiksa.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan tunggal. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa SYAMSIR SENI yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai berikut :

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa SYAMSIR SENI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 05.00 WITA saksi korban INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN hendak buang air kecil, namun saksi korban INDIRA tidak jadi buang air kecil dan lalu saksi korban INDIRA mengatakan kepada ibunya (saksi JUMRIANA BINTI JAFAR) bahwa “sakit dan gatal”, sambil menggaruk alat kelaminnya. Sehingga saksi JUMRIANA menanyakan kepada saksi korban INDIRA “kenapa seperti itu?”, dan saksi korban INDIRA mengatakan bahwa “bapaknya ALICA (tersangka SYAMSIR SENI) pegang iniku (sambil menunjuk alat kelaminnya)”. Sehingga saat itu saksi korban INDIRA menangis. Selanjutnya saksi korban INDIRA menjelaskan kepada saksi JUMRIANA bahwa pada saat itu saksi korban INDIRA sedang bermain, kemudian terdakwa memanggil saksi korban INDIRA masuk ke dalam kamar, selanjutnya saat saksi korban INDIRA berada di dalam kamar, terdakwa menaikkan saksi korban INDIRA ke atas tempat tidur dan membuka celana saksi korban INDIRA hingga batas lutut (dalam keadaan berdiri), kemudian terdakwa juga membuka celana yang digunakannya yang mana saat itu terdakwa berdiri di lantai, sehingga saat itu saksi korban INDIRA melihat alat kelamin terdakwa, Selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan jari telunjuknya ke alat kelamin saksi korban INDIRA dan



saat itu juga terdakwa menggosokkan alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air berwarna putih.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL dengan cara yakni pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban AIRA sambil berkata “masukko sini main sama ALICA”, sehingga saat itu saksi korban AIRA langsung masuk ke kamar. Selanjutnya saat saksi korban AIRA berada di dalam kamar, terdakwa menaikkan saksi korban AIRA ke atas tempat tidur dan membuka celana saksi korban AIRA hingga batas mata kaki dan dalam keadaan berdiri, selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan jari telunjuknya ke alat kelamin saksi korban AIRA.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT, dengan cara yakni membuka celana saksi korban ANGGUN kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban ANGGUN lalu memasukkan jari tangannya ke

alat kelamin saksi korban ANGGUN sambil menggosok-gosokkannya.

- Bahwa pada saat itu, saksi ALICA (anak terdakwa) ada di dalam kamar (tempat kejadian) sedang bermain dan melihat terdakwa memegang-megang alat kelamin saksi korban ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT, saksi korban INDIRA SUCI RAMADHANI, dan saksi korban AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL dengan menggunakan jari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah seringkali melakukan perbuatan tersebut terhadap para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami luka yakni berdasarkan:

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/50/XXI/2014 Rumkit Bhayangkara atas nama: INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN.

**Hasil Pemeriksaan:**

- a. Tampak lecet geser pada selaput dara (*hymen*), tidak sampai dasar dan tidak berdarah.
- b. Tampak lecet geser pada serambi kemaluan pada bagian atas kanan.
- c. Korban tampak histeris dan ketakutan pada saat diperiksa.

**Kesimpulan:**

- 1) Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia anak.
- 2) Ditemukan lecet geser pada selaput dara dan serambi kemaluan akibat persetubuhan tumpul.
- 3) Korban tampak mengalami gangguan psikis saat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami.

2. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/51/XXI/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT.

**Hasil Pemeriksaan:**

- a. Tampak lecet geser pada selaput dara (*hymen*), tidak sampai dasar dan tidak berdarah.
- b. Tampak lecet geser pada serambi kemaluan pada bagian atas kanan.
- c. Korban tampak histeris dan ketakutan pada saat diperiksa.

**Kesimpulan:**

- 1) Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia anak.
- 2) Ditemukan lecet geser pada selaput dara dan serambi kemaluan akibat persetubuhan tumpul.
- 3) Korban tampak mengalami gangguan psikis saat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami.

3. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/51/XXI/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL.

**Hasil Pemeriksaan:**

1. Tampak lecet geser pada selaput dara (*hymen*), tidak sampai dasar dan tidak berdarah.
2. Tampak lecet geser pada serambi kemaluan pada bagian atas kanan.
3. Korban tampak histeris dan ketakutan pada saat diperiksa.

**Kesimpulan:**

- a) Telah diperiksa seorang korban hidup, berjenis kelamin perempuan, dan berusia anak.
- b) Ditemukan lecet geser pada selaput dara dan serambi kemaluan akibat persetubuhan tumpul.
- c) Korban tampak mengalami gangguan psikis saat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## **1. Setiap orang.**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SYAMSIR SENI BIN SENI. Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapan, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Terdakwa selanjutnya dihadapkan di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*).

**2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, karena menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lain.

Bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa ketiga saksi korban mengalami ketakutan pada saat mereka menceritakan pencabulan yang dialami pada orang lain, khususnya ketika mereka diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* bahwa para saksi korban tampak histeris dan ketakutan pada saat diperiksa, sehingga dalam perkara ini terdakwa melakukan pencabulan dengan ancaman kekerasan.

### **3. Telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Bahwa dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>36</sup> Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama jenisnya, dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Pencabulan tersebut dilakukan pada sekitar bulan Desember tahun 2014 dan karena ketiga korban masih di bawah umur, mereka tidak mengetahui tanggalnya. Dilihat dari persesuaian keterangan para saksi dan hasil *Visum Et Repertum*, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-unsurnya, maka di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*

terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut oleh terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI bersalah telah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
2. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).



#### **4. Amar Putusan**

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh Ernawati Amran S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh.Soleh S.H., M.H. dan Amran S Herman S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Abd. Mukhlis S.H. Panitera Penggati pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Yusriana Akib S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan terdakwa, serta Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI bersalah telah melakukan tindak pidana “ancaman kekerasan memaksa, dilakukan perbuatan cabul terhadap korban secara berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## **5. Analisis Penulis**

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan cabul secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI terhadap 3 (tiga) orang anak, yakni INDIRA SUCI RAMDHANI BINTI ERWIN, ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT dan AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan

sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menerapkan pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu mengenai perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling*. Perbuatan berlanjut menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu

saling berhubungan satu sama lain secara erat. Perbuatan berlanjut ini sangat berbeda dengan *concursum-concursum* yang lain. Misalnya, dengan *concursum realis*. Perbedaannya sangat jelas, yakni pada perbuatan berlanjut, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus sama atau sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan, sedangkan pada *concursum realis*, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan.

Mengenai penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm ini yaitu karena perbuatan terdakwa SYAMSIR SENI menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sejenis, yakni pencabulan yang dilakukan kepada INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN, AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL, dan ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT dan dilakukan secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Jadi menurut penulis, dalam kasus ini sudah tepat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) mengenai perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* dan bukan *concursum* yang lain.

Mengenai penerapan pidana materiil pada tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa selaku Hakim Anggota yang menangani perkara dengan nomor putusan 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm , yaitu Muh. Sholeh, S.H., M.H. pada tanggal 14 Desember 2015. Beliau menjelaskan bahwa:

Penerapan pasal terhadap tindak pidana pencabulan anak ini menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam kasus ini, para korban mengalami trauma dan mengalami luka lecet pada alat kelaminnya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum*. Setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini juga berdasarkan kepada *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generale* yang berarti aturan yang khusus meniadakan aturan yang umum.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti

surat yakni *Visum Et Repertum* serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

Maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dengan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, yakni dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana. Yaitu, perbuatan terdakwa melawan hukum, di persidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan dan adanya kesalahan. Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti bahwa aturan yang khusus meniadakan aturan yang umum.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, yang menurut

analisis penulis kurang tepat dijatuhkan terhadap terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, sekiranya sudah tepat. Tuntutan tersebut telah sesuai dengan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa yang hukuman maksimalnya adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Tuntutan Penuntut Umum dapat membuat jera terdakwa, mampu menimbulkan dampak efek pencegahan dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan terdakwa.

Pemidanaan merupakan suatu proses, yang dimana sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan juga tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, namun merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap  
Putusan 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm**

**1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi pencabulan pada sekitar bulan Desember 2014, di rumah terdakwa sendiri di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa.
- b. Bahwa kapan kejadian persisnya, tidak diketahui karena ketiga korban masih di bawah umur sehingga korban tidak mengetahui hari dan tanggal kejadiannya.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 05.00 WITA subuh, ketika INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN hendak buang air kecil namun INDIRA menolak dan mengatakan alat kelaminnya sakit dan gatal sambil menggaruk alat kelaminnya, sehingga ibunya menanyakan kenapa seperti itu, dan Indira menjawab bahwa terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI memegang alat kelaminnya (sambil menunjuk alat kelaminnya).
- d. Bahwa pada saat Indira sedang bermain dengan ALICA (ALISA) anak terdakwa, kemudian terdakwa memanggil INDIRA masuk ke dalam kamar untuk bermain dengan ALICA (ALISA) anak terdakwa.
- e. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, INDIRA bermain dengan ALICA (ALISA) kemudian terdakwa menaikkan INDIRA ke atas tempat tidur dan membuka celana INDIRA hingga sebatas lutut.
- f. Bahwa terdakwa membuka celana yang digunakannya juga, yang mana pada saat itu terdakwa pada posisi berdiri sehingga saat itu INDIRA melihat alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa



memegang alat kelamin INDIRA lalu menggosok- gosokkan jari telunjuknya ke alat kelamin INDIRA dan pada saat itu juga terdakwa menggosok alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih.

- g. Bahwa hal yang sama dilakukan pada korban ANGGUN dan AIRA.
- h. Bahwa ketiga korban tersebut merasakan sakit apabila hendak buang air kecil.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Dari uraian fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia N. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa

berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm adalah:

- a. Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN, AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL, JUMRIANA BINTI JAFAR, HASNI BINTI ANTU, ALISA TRIANTI BINTI SYAMSIR SENI, SALMA BINTI SYARIFUDDIN, dan ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, kecuali saksi INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN, AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL, dan ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT karena ketiganya masih berada di bawah umur 15 tahun.

- d. Hakim mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan para saksi di persidangan, namun terdakwa tidak pula dapat membuktikan bantahannya.
- e. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa, yaitu SYAMSIR BIN SENI.
- f. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Mauluddin M, Sp. F, yakni:
  - 1) Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/50/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN.
  - 2) Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT.
  - 3) Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL.
- g. Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan hasil *Visum Et Repertum* dan memperoleh fakta-fakta tentang adanya kecocokan antara ketiga alat bukti tersebut.
- h. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana

dikemukakan dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di dalam persidangan sehingga terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

- i. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya:
  - 1) Setiap orang
  - 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
  - 3) Telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
- j. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal.

- k. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan pencabulan secara berlanjut terhadap anak, dan karena terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI merupakan orang yang mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- l. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- m. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

n. Sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yakni:

**Keadaan yang memberatkan:**

- 1) Terdakwa melakukan pencabulan dengan anak yang masih di bawah umur.
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
  - 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
- o. Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

## **2. Putusan Hakim**

Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia N. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang

didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yang dibuat oleh Penuntut Umum.

### **3. Analisis Penulis**

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum dan juga memenuhi rasa keadilan. Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pidanaan) dan di dalam putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti

dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pembedaan hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari:

- a. Sisi pelaku kejahatan
- b. Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban)
- c. Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani perkara ini, yaitu Hakim Ketua Ernawati Anwar, S.H. pada tanggal 14 Desember 2015 untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa:

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan



kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak.

Dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap korban INDIRA SUCI RAMADHANI BINTI ERWIN, AIRA NUR ADHIRA BINTI NUR SYAWAL, dan ANGGUN PRATIWI BINTI ARAFAT. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 (dua belas) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 9 (sembilan) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan.

Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Ernawati Anwar, S.H.

menjelaskan bahwa:

Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Kedua, cara terdakwa mencabuli para korbannya tidak melakukan kekerasan. Yang ketiga, menurut Majelis Hakim, meski terjadi pencabulan namun korban tidak mengalami robekan pada selaput darah dikarenakan terdakwa hanya memasukkan jari tangannya ke alat kelamin para korban dan tidak memasukkan alat kelamin terdakwa.

Hakim Anggota, Muh. Sholeh, S.H., M.H menambahkan:

Hakim tidak terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut dari negara yang melakukan penelitian secara empiris. Hakim menuntut secara subjektif berdasarkan Standarisasi Penjatuhan Pidana. Hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa, selain karena terdakwa hanya memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin para korban dan tidak sampai melakukan persetubuhan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah memasuki usia lanjut dan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya. Disamping itu terdapat hal-hal yang tidak dimuat di putusan, yakni suasana kebatinan terdakwa dalam persidangan dan kondisi psikologis para korban.

Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam perkara ini, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kurang tepat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 12 (dua belas) tahun menurut penulis sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun terhadap terdakwa tidak memberikan rasa keadilan bagi para

korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* para korban dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menyatakan bahwa para korban mengalami gangguan psikis saat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialaminya. Serta tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI ini sangat meresahkan masyarakat sekitar. Menurut penulis, penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tindak pidana pencabulan dapat berkurang di kemudian hari. Selain itu, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan alasan pemberatan pidana pada Pasal 64 ayat 1 karena tindak pidana tersebut dilakukan secara berlanjut dan dalam Pasal 64 ayat 1 dijelaskan bahwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa. Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang ini dapat memberatkan pembedaan terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak yang menyatakan terdakwa SYAMSIR SENI BIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sudah tepat. Hal itu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian hasil *Visum Et Repertum* dan keterangan terdakwa. Serta terdakwa dianggap sehat jasmani

dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak kurang tepat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIR SENI BIN SENI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ini tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana korban mengalami trauma psikis dan rasa malu akibat peristiwa pencabulan ini serta tidak mampu menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tidak terulang di kemudian hari . Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 64 ayat 1 KUHP perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang yang dapat memberatkan pemidanaan terdakwa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kesusilaan dalam hal ini anak sebagai korban pencabulan, hakim harus mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana

pencabulan terhadap anak di bawah umur serta ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja tetapi juga perlu difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi korban..

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika
- Adami Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-5
- Ahmad Juntika dan Mubiar Agustin, 2010, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke-8
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4
- Sulistiyowati Irianto (ed), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan  
Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Perlindungan Anak

## **INTERNET**

*<http://elibrary.ub.ac.id/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-bersyarat-studi-di-pengadilan-negeri-karanganyar.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WITA*

*<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 22.10 WITA*

*<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.28 WITA*